

EVALUASI ADANYA *REFOCUSING* DAN REALOKASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA BBKP SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Listyana Era Murti¹, Sopanah², Khojanah Hasan³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis -Universitas Widyagama Malang,
Email: tya.murti@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Widyagama Malang,
Email: anasopanah@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Widyagama Malang,
Email: janahasan71@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana proses *refocusing* dan realokasi anggaran pada Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, 2) Bagaimana dampak *refocusing* dan realokasi anggaran terhadap kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengangkat suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel saja atau lebih sedangkan untuk metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang kondisinya alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil penelitian ini adalah *refocusing* anggaran untuk dana penanggulangan Covid1-19 yang terjadi pada bulan April 2020 yang mengambil dana RM (rupiah murni) dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja BBKP Surabaya secara umum. Adapun pengaruh dari *refocusing* realokasi tersebut lebih kepada terhambatnya penyerapan anggaran dikarenakan mundurnya semua kegiatan akibat pandemi covid-19.

Kata kunci : Pandemi Covid-19, Refocusing Anggaran

Kata kunci : Pandemi Covid-19, Refocusing Anggaran

Abstract

This study aims to find out 1) How is the process of refocusing and reallocating the budget at the Surabaya Agricultural Quarantine Center, 2) How is the impact of refocusing and budget reallocation on the performance of the Surabaya Agricultural Quarantine Center. This research is a descriptive study using qualitative methods. Descriptive research is research that raises a problem formulation with regard to the question of the existence of independent variables on only one or more variables, while qualitative method is a method used to examine objects in natural conditions where the researcher is the key instrument, data collection techniques are carried out. by triangulation, data analysis is inductive or qualitative, and qualitative research results emphasize meaning rather than generalization. The result of this study is that the budget refocusing for Covid1-19 prevention funds that occurred in April 2020 which took RM (pure rupiah) funds from the DIPA (Budget Implementing List) did not significantly affect the performance of BBKP Surabaya in general. The effect of the reallocation refocusing is more on the delay in budget absorption due to the retreat of all activities due to the COVID-19 pandemic.

Key Words : Covid-19 Pandemic, Refocusing The Budget

PENDAHULUAN

Diakhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan mewabahnya virus yang mematikan yaitu Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan Virus Covid-19. Virus tersebut dengan cepat menginfeksi manusia di sebagian besar negara-negara di dunia dan menjadi sebuah pandemi. Tidak terkecuali, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terinfeksi Virus Covid-19, tak tanggung-tanggung sejak awal diumumkannya kasus Covid-19 pada awal Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 kasus penduduk yang terinfeksi Covid-19 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Kasus positif Covid-19 bertambah 8.074 menjadi 743.198 kasus, pasien sembuh bertambah 7.356 menjadi 611.097 orang, pasien meninggal bertambah 194 menjadi 22.138 orang (covid.19.go.id, 2020).

Banyaknya penduduk yang terinfeksi virus Covid-19 ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi dan mengendalikan persebaran virus tersebut, salah satunya melalui kebijakan social distancing atau menjaga jarak social hingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dampak kebijakan yang diterapkan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 tersebut membawa pengaruh yang cukup besar terhadap berbagai macam sektor, khususnya sektor yang sangat berpengaruh yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain pelayanan publik, industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan.

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2020 berkontraksi 2,2 persen (YoY), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Melunaknya kontraksi ekonomi ditopang oleh tujuh sektor yang mampu tumbuh positif, terutama sektor-sektor esensial di tengah pandemi seperti jasa kesehatan dan infokom. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah yang tumbuh 1,8 persen (YoY), menjadi bantalan di tengah kontraksi yang terjadi pada komponen lainnya. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Desember 2020 mencapai 96,1 persen dari target APBN-Perpres 72/2020. Capaian tersebut turun 16,7 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara mengalami peningkatan 12,7 persen, yang mencapai 94,6 persen dari APBN-Perpres 72/2020. Defisit anggaran hingga Desember 2020 sekitar 6,1 persen terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 2,2 persen PDB. Pembiayaan anggaran mencapai 114,6 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020 (meningkat 196,2 persen, YoY) yang utamanya bersumber dari pembiayaan utang. (Bappenas,2020)

Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro. Faktor lain yang juga memberatkan yaitu karena sebarannya sudah menjangkau sebagian besar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini.

Langkah utama yang sudah dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara

Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020. Pertama adalah Refocusing Anggaran K/L dan pemerintah daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan COVID-19. Kedua, Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19. Ketiga, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19.

Untuk *refocusing* rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi. Untuk penghematan K/L sumber penghematan belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan COVID-19. Semuanya ditunda seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, belanja belanja lain. Sebagai salah satu contoh pertemuan sekarang ini tidak memakai ruangan berarti konsumsi listrik turun, dan setiap pertemuan sekarang tidak ada konsumsi. Belanja modal ditunda untuk dikerjakan *multiyear*, kegiatan proyek yang sudah dikontrakkan untuk dinegoisasikan lagi kepada pihak ketiganya untuk bisa ditunda pengerjaannya. Sementara untuk belanja pegawai adalah penundaan kenaikan tunjangan untuk CPNS. Belanja yang dikecualikan dari pemotongan adalah belanja untuk penanggulangan dampak COVID-19, serta belanja untuk penanggulangan stunting, kematian ibu dan bayi, dan pemberantasan penyakit menular lain seperti TBC, HIV-AIDS, DBD, tetap dijaga efisiensi & efektivitasnya. Belanja bantuan sosial yang menjadi bagian dari stimulus social safety nets. Pagu non Rupiah Murni (non-RM) seperti PNBPN & BLU, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) karena tidak dapat direalokasi ke program lain. APBD dijadikan instrumen utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Melalui kebijakan anggaran, pemerintah akan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi dan kebijakan Kesehatan (Sanjaya, 2020).

Dalam rangka Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Kementan secara responsif menindaklanjuti dengan melakukan refocusing kegiatan dalam bentuk: 1). Pencegahan penularan Covid-19; 2). Pengamanan Ketersediaan Pangan; dan 3). Social Safety Net dengan total refocusing anggaran sebesar Rp1,85 T. Sedangkan usulan realokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 1). Pencegahan penularan Covid-19 Rp. 45,00 M; 2). Pengamanan Ketersediaan Pangan Rp198,95 M; dan 3). Social Safety Net Rp1,60 T. Untuk memperkuat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 lingkup Kementerian Pertanian, telah dikeluarkan SE Mentan No.1 Tahun 2020 tentang Strategi Kementerian Pertanian Dalam Rangka Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19) dan SE No.2 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Anggaran lingkup Kementerian Pertanian T.A 2020 sebagai antisipasi dampak pandemi Virus Corona (COVID-19).

Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian – Kementerian Pertanian yang sesuai dengan SE No.2 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Anggaran lingkup Kementerian Pertanian T.A 2020 sebagai antisipasi dampak pandemi Virus Corona (*COVID-19*), harus segera melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran guna percepatan penanganan covid-19 lingkup BBKP Surabaya agar semua rencana kegiatan masih dapat terlaksana dengan baik.. Fokus penelitian pada bagaimana proses *refocusing* dan realokasi anggaran pada Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya dan bagaimana dampak *refocusing* dan realokasi anggaran terhadap kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui proses *refocusing* dan realokasi *anggaran* pada Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya dan untuk mengetahui dampak *refocusing* dan realokasi

anggaran terhadap kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Kegunaan Penelitian secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sarana pengembangan teori dan ilmu pengetahuan secara teoritis berkaitan dengan variable-variabel yang mempengaruhi kebijakan *refocusing* serta pengaruh kebijakan *refocusing* terhadap kinerja BBKP Surabaya. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberi informasi bagi akademisi dan masyarakat umum tentang pentingnya *refocusing* anggaran dan pengaruhnya terhadap kinerja suatu organisasi. Manfaat penelitian ini bagi akademisi adalah memberikan deskripsi tentang hal-hal yang mempengaruhi kebijakan *refocusing* anggaran sebagai referensi penelitian yang akan datang dalam bidang yang sama.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Akuntansi Publik

Akuntansi publik yaitu suatu profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Tugas akuntan publik meliputi analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak, dan sebagainya. Sebuah perusahaan melakukan pemeriksaan secara rutin tentang laporan keuangan sehingga laporan tersebut menjadi wajar, handal, dan memiliki daya guna yang maksimal.

Teori Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi sektor publik, yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu (periode) tertentu, umumnya adalah satu tahun anggaran. Anggaran sektor publik berisikan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, dan berisi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang (Mardiasmo, 2009).

Teori Refocusing Anggaran

Weston, dkk berpendapat bahwa *refocusing* akan memudahkan manajer untuk memantau dan membuat keputusan yang lebih baik ketika bisnis perusahaan diposisikan lebih sempit. Hal ini juga terjadi dalam sebuah Negara, konsep *Refocusing* juga selayaknya diterapkan dalam menjamin stabilitas keuangan sebuah Negara utamanya ketika menghadapi suatu krisis. *Refocusing* menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisasi terjadinya resesi ekonomi dalam menjamin stabilitas ekonomi nasional. Pertimbangan *refocusing* tentunya terjadinya hentakan ekonomi global akibat suatu kejadian atau rapuhnya sistem ekonomi akibat dampak dari kebijakan yang tidak tepat atau strategis.

Teori Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Sularso dan Restianto (2011) menyebutkan kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi- potensi kinerja yang akan berlanjut. Mardiasmo (2009)

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono.2010:9). Desain penelitian yang digunakan desain penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Lokasi penelitian berada di Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Jl. Raya Bandara Ir. H. Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

Informan dalam penelitian ini sebanyak dua orang informan yaitu Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan serta Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi BBKP Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan peneliti terdapat 4 langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -3,61% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya belanja perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas tetap, perjalanan local dan perjalanan dinas antar UPT;
2. Ditiadakannya kegiatan in-house training, seminar OPTK dan seminar HPHK, seminar-seminar teknis dan administrasi sehingga berkurang juga belanja jasa, belanja bahan
3. Turunnya realisasi belanja lembur;
4. Tidak maksimalnya pengadaan belanja 53 karena pandemi covid.

Selama periode berjalan, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan pagu anggaran berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tabel Perubahan DIPA dan Revisi

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	30.000.000.000,00	63.900.000.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	4.100.000.000,00	8.200.000.000,00
Jumlah Pendapatan	34.100.000.000,00	72.100.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	21.075.706.000,00	21.320.116.000,00
Belanja Lembur	1.288.435.000,00	1.485.271.000,00
Belanja Barang Operasional	6.363.674.000,00	7.234.348.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.225.536.000,00	3.097.610.000,00
Belanja Barang Persediaan	4.435.494.000,00	3.890.844.000,00
Belanja Jasa	3.342.725.000,00	3.981.379.000,00
Belanja Pemeliharaan	3.914.290.000,00	3.178.657.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.561.290.000,00	10.202.231.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.253.865.000,00	14.069.346.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.239.324.000,00	3.810.925.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	153.850.000,00

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Jumlah Belanja	55.700.339.000,00	72.424.577.000,00

Sumber : Laporan Keuangan BBKP Surabaya Tahun Anggaran 2020



Gambar 4.1 Rincian Belanja Penanggulangan Covid-19 di BBKP Surabaya

Sumber : Laporan Keuangan BBKP Surabaya Tahun Anggaran 2020

Pernyataan Penting Informan

Tabel 4.2 Pernyataan Penting Informan

Informan	Pernyataan Penting	Makna
Wiwin Wibowo (Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan)	Dalam <i>refocusing</i> dan realokasi dana untuk penanganan pandemi covid-19, difokuskan pada pencegahan menularnya virus covid-19 di dalam lingkup keluarga Besar BBKP Surabaya yang terdiri dari 13 wilayah kerja (wilker) dengan cara, pembelian multivitamin, masker dan swab massal seluruh pegawai baik PNS, tenaga kontrak dan tenaga outsourcing untuk memastikan kesehatan personil BBKP Surabaya	Pentingnya penanggulangan dampak Covid-19
Tri Handono (Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi)	Proses <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mempertimbangkan penyesuaian besaran belanja wajib (<i>mandatory spending</i>) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram, pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), penyesuaian alokasi, penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di	<i>Refocusing</i> dan realokasi dana diambil dari sumber dana Rupiah Murni (RM)

	bidang keuangan negara, dilakukan antara lain terhadap dokumen perencanaan anggaran dan/atau pelaksanaan anggaran, yang diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pengambilan dana untuk refocusing dari dana RM (Rupiah Murni), selain itu juga berdasarkan dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1195/RC.110/A/04/2020 tanggal 8 april 2020 tentang Penghematan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian TA 2020	
--	---	--

KESIMPULAN DAN SARAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 yang dilakukan Kementerian dan Lembaga berdampak pada kegiatan BBKP Surabaya. Hambatan yang dialami dengan adanya tindakan refocusing adalah adanya beberapa kegiatan pembangunan yang tertunda pelaksanaannya atau kegiatan tersebut dialihkan atau dihapus. BBKP Surabaya perlu fokus bukan hanya pada besaran serapan anggaran penanganan Covid-19 tetapi juga pada kualitas serapan anggarannya. Tujuannya agar masyarakat pada umumnya dan Pegawai Lingkup BBKP Surabaya betul-betul merasa aman dalam beraktifitas dan roda ekonomi kembali berjalan. Saran dari peneliti supaya dari kebijakan refocusing anggaran pada saat pandemi COVID-19 tentunya harus berbasiskan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan semua dalam hal pertanggungjawaban harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar setiap potensi penyimpangan anggaran dapat dicegah.

REFERENSI

- Ayu Feranika dan Dini Haryati. 2020. *Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19*. Bussiness Inovation and Enterpreneurship Journal. Vol 2. No.3.
- BBKP Surabaya. 2020. *Catatan Atas Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Semester II Tahun Anggaran 2020*. Sidoarjo
- BBKP Surabaya. 2020. *Laporan Kinerja Tahun 2020*. Sidoarjo
- Badan Karantina Pertanian. *Laporan Keuangan Badan Karantina Pertanian Semester II Tahun 2020*. Jakarta
- Deden Rafi Syafig Rabbani. 2020. *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD Dalam Upaya Penanganan Pandemic Covid-19*. Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar. Vol 4. No.1.
- Djarwanto, 2010. *Pokok-pokok Analisis Laporan Keuangan Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul & Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Teori. Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://digilib.iunsby.ac.id/>
- <https://dspace.uui.ac.id/>
- <http://karantinasby.pertanian.go.id/>
- <http://rb.pertanian.go.id>
- <https://www.bappenas.go.id/>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- Husaini, Usman. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

- Junaidi, dkk. 2020. *Melakukan Penelitian Atas Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Halu Oleo Law Review. Vol 4. No.2.
- Kurnia Putri Mirani, dkk.2021. *Strategi Kebijakan Fiscal Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemic Covid-19*. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/>
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Munawir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Munir, B. 2003. *Perencanaan Anggaran Kinerja : Memanngkas Inefisiensi Anggaran Daerah*. Samawa Center.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perenominian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-185/PMK.02/2020 Tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan / Atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Sanjaya, Natta. 2020. *Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten*. Jurnal Ilmu Administrasi STAILAN Bandung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sularso, Havid & Restianto, Yanuar E. 2011. 'Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah'. vol. 1. no. 2. hal. 109-124.
- Surat Edaran Mentan No.1 Tahun 2020 tentang Strategi Kementerian Pertanian Dalam Rangka Pencegahan dan Perlindungan Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
- Surat Edaran Mentan No.2 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Anggaran lingkup Kementerian Pertanian T.A 2020 sebagaiantisipasi dampak pandemic.
- Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam rangka Percepatan Penganganan Covid-19.
- Sutopo H.B.. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Sofaer, S. (1999). *Qualitative methods: what are they and why use them?*. Health Services Research 34:4 Part II (December 1999).
- Sopannah dan Mohammad Fauzi Fikri Haikal. 2021. *Refocusing Anggaran Dia Masa Pandemic Covid-19*. Jurnal Widyagama Universitas Widyagama Malang.
- Tatang, M.Amirin. 1995. *Menyusun Perencanaan Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Weston, J. fred. 1997. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* Edisi 9. Jakarta: Erlangga
- Yesi Mutia Basri dan Gusnardi. 2021. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia.